



Realisasi Identitas Politik Luar Negeri Indonesia sebagai ‘Peace Maker’ melalui *Constructive Engagement* dalam Konflik Rohingya

Ali Muhsin¹, Barka Alhudaebi Nawawi², Surya Mahesa³

^{1,2,3}Hubungan Internasional, Humaniora, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

Email: ¹alimuhsin2297@gmail.com, ²barkalhudaebi@gmail.com,

³surya.mahesa1083@mhs.unida.gontor.ac.id

Abstrak

Sejak proklamasi kemerdekaannya, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam diplomasi internasional, mengusung prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Salah satu wujud nyata dari peran Indonesia di dunia internasional adalah identitasnya sebagai ‘peace maker’, yang tercermin dalam upaya diplomasi yang diambil dalam menangani konflik Rohingya. Artikel ini mengeksplorasi peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Rohingya melalui pendekatan *constructive engagement*, terutama dalam diplomasi multilateral dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan diplomasi bilateral dengan Myanmar. Dalam kerangka diplomasi tersebut, Indonesia berfokus pada pendekatan kemanusiaan dan hak asasi manusia, dengan mendorong OKI untuk menggunakan diplomasi lunak guna mencapainya tanpa kekerasan. Di sisi lain, Indonesia juga berusaha mengatasi kendala yang muncul dalam diplomasi bilateral dengan Myanmar, yang enggan menerima intervensi asing, dengan menawarkan solusi berbasis dialog dan kerjasama yang konstruktif. Hasilnya, Indonesia berhasil mengukuhkan identitasnya sebagai negara pencipta perdamaian di kancah internasional, yang tidak hanya mencerminkan politik luar negeri yang aktif, tetapi juga sebagai wujud prestise negara yang dihormati dalam penyelesaian konflik-konflik internasional. Artikel ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai kontribusi Indonesia dalam diplomasi perdamaian global dan relevansi norma serta nilai yang terkandung dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Kata kunci: Diplomasi, Indonesia, Konflik Rohingya, Constructive Engagement, Peacemaker.

Abstract

Since its independence declaration, Indonesia has demonstrated its commitment to international diplomacy, upholding the principle of an independent and active foreign policy. One of the tangible manifestations of Indonesia’s role in the international arena is its identity as a ‘peace maker,’ which is reflected in the diplomatic efforts made to address the Rohingya conflict. This article explores Indonesia’s role in resolving the Rohingya conflict through a constructive engagement approach, particularly in multilateral diplomacy with the Organization of Islamic Cooperation (OIC) and bilateral diplomacy with Myanmar. In this diplomatic framework, Indonesia focuses on humanitarian and human rights approaches, encouraging the OIC to employ soft diplomacy to achieve peaceful solutions without resorting to violence. On the other hand, Indonesia also navigates challenges in bilateral diplomacy with Myanmar, which is reluctant to accept foreign intervention, by offering solutions based on dialogue and constructive cooperation. As a result, Indonesia has successfully established its identity as a peace-making nation on the global stage, reflecting not only an active foreign policy but also as a symbol of the country’s prestige, respected for its involvement in resolving international conflicts. This article aims to deepen the understanding of Indonesia’s contributions to global peace diplomacy and the relevance of the norms and values inherent in Indonesia’s foreign policy.

Keywords: Indonesia, Rohingya Conflict, OIC, Constructive Engagement, Peacemaker.

PENDAHULUAN

Sejak proklamasi kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam arena politik internasional. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia telah menjadi anggota aktif dalam komunitas internasional. Ketika memasuki abad ke-21, diplomasi luar negeri Indonesia telah berusia lebih dari enam puluh tahun. Dalam perjalanan waktu ini, Indonesia telah mengalami berbagai pengalaman dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang politik internasional, baik yang manis maupun yang pahit. Membela kepentingan Indonesia dalam kancah internasional telah menjadi rutinitas bagi para pelaku politik Indonesia. Mereka telah menghadapi tantangan dan perubahan dalam diplomasi dan politik luar negeri, serta melalui pasang surut yang terkadang sulit dihadapi. Semenjak Indonesia menjadi anggota aktif masyarakat internasional hingga saat ini kondisi internasional telah mengalami perubahan dan perkembangan yang semakin kompleks dan inklusif dengan di iringi masuknya aktor-aktor baru seperti organisasi-organisasi Non-pemerintah (*non-government organization*, NGOs) dan organisasi-organisasi pemerintah internasional (*International Government Organizations*, IGOs) juga isu-isu ideasional atau non-material. Pasang surut politik luar negeri Indonesia dan dinamika politik dalam negeri Indonesia serta perubahan dan perkembangan entitas politik internasional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, menanggapi dinamika perubahan tersebut, Indonesia harus fokus tidak hanya pada perumusan politik luar negerinya, tetapi juga pada tataran implementasinya (Wuryandri, 2018, hlm 2).

Setelah berakhirnya perang dingin yang di tandai dengan munculnya aktor-aktor baru yaitu organisasi-organisasi internasional Non-pemerintah (*International Non-Government Organizations*, INGOs) seperti Save The Children, ICRC, WWF, WVI, dan Asian People Forum dan organisasi-organisasi pemerintah internasional (*International Government Organizations*, IGOs) seperti PBB, WTO, UNICEF, UNDP, IMF, World Bank ASEAN, *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *East Asia Summit* (EAS) serta isu-isu ideasional atau non-material seperti gagasan, identitas, budaya, norma, dan lain sebagainya, membuat arah kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami kecenderungan yang cukup kuat untuk lebih memfokuskannya pada multilateralisme dengan berbagai macam kerja sama. Secara prinsipil dimensi diplomasi politik Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Namun dengan prinsip tersebut tidak lantas membuat kebijakan Indonesia kaku dalam merespon isu-isu internasional yang sifatnya dinamis, Indonesia melakukan pendekatan yang luwes dalam merespon isu-isu tersebut yaitu dengan cara-cara kreatif tanpa melanggar prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, karena pada hakikatnya prinsip yang bebas dan aktif tetap memberikankesempatan pada pemerintah untuk kemudian secara kreatif dan juga fleksible dalam merespon berbagai masalah yang berkembang seiring berjalannya waktu (Wuryandri, 2018, hlm 175). Dalam kasus Konflik Rohingya misalnya, konflik Rohingya merupakan konflik yang melibatkan Etnis Rohingya dan Rakhine. Konflik tersebut memiliki dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia dimana Etnis Rohingya yang merupakan etnis yang tertindas dan juga minoritas melakukan pelarian dari Myanmar dan mengungsi kebeberapa negara terdekat diantaranya adalah Indonesia. Para pengungsi tersebut kemudia mulai bertambah dari waktu ke waktu tahun ke tahun sehingga mencapai puncaknya pada tahun 2015 lalu (Prasetya & Gewati, 2020). seiring berjalannya waktu, meningkatnya pengungsi dari Myanmar ke Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan ancaman terhadap kestabilan nasional Indonesia jika tidak segera mengambil tindakan. Indonesia cukup tanggap dalam menyadari ancaman tersebut sehingga Indonesia mencoba mengeluarkan beberapa kebijakan yang di anggap sebagai respon terhadap konflik rohingya yang berdapak langsung terhadap Indonesia, ada beberapa kebijakan yang di lakukan Indonesia diantaranya adalah dalam bentuk bantuan kemanusiaan terhadap para korban konflik khususnya etnis Rohingya, kemudia diplomasi, Indonesia juga melakukan kebijakan dalam bentuk diplomasi dalam menangani kasus tersebut. Ada dua bentuk diplomasi yang dilakukan Indonesia yaitu diplomasi multilateral dan diplomasi bilateral, diplomasi multilateral Indonesia lakukan dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), adapun diplomasi multilateral Indonesia lakukan dengan Myanmar yang merupakan pemerintahan yang berada di atas etnis Rohingya secara langsung (Sanyoto, Harini & Dipokusumo, 2019).

Bentuk diplomasi Indonesia dengan organisasi pemerintahan internasional yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang menjadi kebijakan ndonesia dalam menangani konflik Rohingya adalah Diplomasi Multilateral dengan upaya pendekatan Kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia dalam diplomasinya dengan OKI dalam upaya menangani konflik tersebut berusaha untuk mendorong OKI agar menggunakan pendekatan yang tanpa adanya indikasi kekerasan dan tekanan yang biasa disebut sebagai *soft diplomacy* atau *constructive engagement* sehingga tujuan dan kepentingan bersama dapat dicapai dan terselesaikan secara damai (Sanyoto, Harini & Dipokusumo, 2019). Sejauh ini Indonesia merupakan negara yang paling aktif dalam upaya membantu menyelesaikan konflik Rohingya, begitu pula dari segi bantuan nyata terhadap para korban konflik, berbagai bantuan yang di salurkan oleh Indonesia untuk para

korban konflik Rohingya di antaranya adalah bantuan-bantuan dalam bentuk pangan, sandang dan juga obat-obatan seperti beras, makanan bayi, obat-obatan juga pakaian. Berbagai macam bentuk bantuan tersebut merupakan sebuah kelanjutan dari komunikasi intensif antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar dalam usaha menyelesaikan konflik terbut di Myanmar, Tercatat sebanyak sepuluh kontener barang bantuan berupa pangan, sandang dan juga obat-obatan telah dikirimkan (Siswono, 2016).

Dalam mendukung peran Indonesia sebagai peacemaker dalam konflik Rohingya, data dan fakta konkret menunjukkan upaya signifikan yang telah dilakukan oleh Indonesia. Hingga 2024, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya berada di Bangladesh, terutama di kamp Cox's Bazar, yang merupakan salah satu kamp pengungsi terbesar di dunia. Selain itu, sekitar 600.000 Rohingya masih bertahan di Rakhine State, Myanmar, dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Indonesia telah mengambil beberapa inisiatif, seperti mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U pada 2017 untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat Rohingya dan etnis lainnya, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, dan perlengkapan dasar senilai lebih dari USD 1 juta pada 2023 melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre). Di tingkat multilateral, Indonesia juga mendukung langkah hukum yang diambil oleh Gambia terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional (ICJ), memperjuangkan hak-hak Rohingya secara internasional. Namun, situasi di Myanmar tetap sulit, dengan laporan dari Amnesty International pada 2023 yang menunjukkan bahwa tindakan militer terhadap Rohingya masih berlanjut. Proses repatriasi pengungsi Rohingya juga terkendala karena minimnya jaminan keamanan dan hak asasi bagi mereka yang kembali ke Myanmar. Meskipun menghadapi hambatan, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjalankan peran aktif sebagai mediator dan memberikan bantuan kemanusiaan, sambil berupaya memajukan solusi damai bagi konflik ini

Setiap Politik luar negeri yang di implementasikan Indonesia secara tidak langsung akan menggambarkan arah kebijakan Indonesia di ranah internasional. Indonesia memperoleh identitas sebagai pencipta perdamaian (*peacemaker*) dan pembangun jembatan (*bridge-builder*) di ranah internasional yang mengisaratkan peran indonesia dalam menangani konflik-konflik internasional, oleh karna itu beberapa kebijakan Indonesia di ranah internasional tidak akan jauh dari identitasnya sebagai pencipta perdamaian (Rosyidin, 2020, hlm 87). Pada era reformasi hususnya rezim BJ, Habibie implementasi politik luar negri lebih di tekankan pada upaya memperoleh dukungan internasional terhadap kepemimpinannya dikarnakan krisis legitimasi domestik kala itu. Tidak jauh dari identitasnya sebagai pencipta perdamaian (*peacemaker*) langkah kebijakan yang dilakukan oleh BJ.habibie adalah dengan menawarkan referendum terhadap Timor Timur (Wuryandri, 2008, hlm. 2). Dengan catatan positif di bidang HAM ini Habibie benar-benar berhasil menarik perhatian internasional sebagai kompensasi atas minimnya legitimasi politik dalam negri kala itu terhadap kepemimpinannya setelah Orde Baru. Dalam kebijakan yang di ambil oleh Habibie tersebut meskipun secara subjektif untuk memperoleh pengakuan dukungan internasional, namun secara objektif kebijakan tersebut telah mencerminkan identitas peran Indonesia di kancah internasional sebagai pencipta perdamaian.

Sejalan dengan kebijakan politik luar negri Habibie yang menggambarkan identitas peran indenesia sebagai *peacemaker*, diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menangani konflik Rohingya secara tidak langsung juga menggambarkan identitas peran Indonesia di ranah internasional. Bentuk diplomasi Indonesia dengan organisasi pemerintahan internasional yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang menjadi kebijakan ndonesia dalam menangani konflik Rohingya adalah Diplomasi Multilateral dengan upaya pendekatan Kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menangani konflik Rohingya di negara Myanmar Indonesia dalam diplomasinya dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia berusaha mendorong OKI untuk menggunakan *soft diplomacy* atau yang biasa disebut dengan *constructive engagement*. Indonesia juga melakukan diplomasi dengan Myanmar dalam menangani konflik tersebut melalui OKI.

Dari beberapa penjabaran di atas perlu kita kaji bersama tentang pentingnya mengkaji norma dan nilai dari dari setiap kebijakan politik luar negri Indonesia sebagai prestise yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Identitas pencipta perdamaian (*peacemaker*) yang di sematkan kepada indonesia di ranah politik luar negri Indonesia merupakan identitas yang terkonstruksi secara sosial akibat norma-norma kebijakan politik luar negri indonesia. Dalam tujuan negara (*national interest*) prestise merupakan salah satu dari empat tujuan negara yaitu; keamanan (*security*), kedaulatan (*autonomy*), kesejahteraan (*welfare*), dan nama baik (*prestise*). Dengan prestise tersebut Indonesia akan dipandang dan diperhitungkan oleh negara-negara di dunia dari segi kebijakan dalam menghadapi isu-isu HAM dan konflik internasional.

RUMUSAN MASALAH

Dari pendahuluan yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditulis rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Indonesia merealisasikan identitas politik luar negerinya sebagai *peace maker* dalam melakukan diplomasi dengan negara Myanmar dalam mengatasi konflik Rohingya melalui strategi *constructive engagement* ?”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Rohingya

Kelompok Etnis Rohingya di wilayah Myanmar adalah kelompok Muslim minoritas dan merupakan suku yang terletak wilayah bagian Rakhine dimana memang terdapat penduduk asli yang disebut sebagai suku Rakhine. Adapun Rakhine sendiri merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa bagian desa, dan desa-desa ini adalah rumah atau domisili dari dua suku tersebut. Mereka tinggal di wilayah yang sama namun masih dapat terjadi gesekan yang pada akhirnya berujung pada konflik baik berupa kekerasan, pengucilan dan juga penindasan yang di alami Rohingya. Suku Rohingya yang merupakan bukan penduduk asli dari Myanmar sebenarnya telah menduduki wilayah Myanmar sejak abad ke-7 (Ali, 2022). Hal ini menjadi fokus dari penelitian ini dengan diplomasi indonesia yang memiliki arti *constructive engagement* sebagai pendekatan diplomasi yang menekankan dialog, kerja sama, dan keterlibatan aktif untuk mendorong perubahan positif tanpa isolasi atau konfrontasi. Dalam konteks konflik Rohingya, Indonesia menerapkan pendekatan ini dengan mengedepankan diplomasi aktif, dialog, dan bantuan kemanusiaan. Indonesia terus berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar untuk mendorong solusi damai, termasuk implementasi rekomendasi Komisi Kofi Annan. Melalui forum ASEAN, Indonesia juga mendorong akses bantuan kemanusiaan tanpa melanggar prinsip *non-interference*.

Pendekatan ini diwujudkan dalam diplomasi kemanusiaan, seperti pengiriman bantuan ke pengungsi Rohingya, serta peran sebagai mediator dalam dialog internasional. Hal ini sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai *peacemaker* di kawasan. Dari 135 kelompok etnis di Myanmar, Rohingya adalah kelompok etnis yang mengalami penolakan pengakuan dari pihak pemerintah dan juga beberapa etnis lainnya. Mereka menganggap bahwa rohingya adalah penduduk dari Bengali yang kemudian mengacu pada suku di Bangladesh sendiri, kemudian dalam hal tersebutlah mereka di anggap merupakan orang-orang Bengali yang ilegal atau imigran-imigran gelap di daerah Myanmar yang berdekatan dengan Bangladesh. Mereka yang menolak suku tersebut kemudian menyebutnya sebagai etnis rohingya atau muslim minoritas. Etnis Rohingya juga tidak diakui oleh pemerintah Bangladesh, sehingga menjadikannya sebagai etnik tanpa kewarganegaraan atau *stateless*. Selain kurangnya kewarganegaraan, Muslim Rohingya adalah etnis minoritas yang paling teraniaya menurut PBB (Umam, & kandar, 2022). Dalam menjalankan peran sebagai *peacemaker* dalam konflik Rohingya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik dalam konteks diplomasi multilateral melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun secara bilateral dengan Myanmar. Di tingkat multilateral, tantangan utama adalah perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota OKI. Meski OKI secara kolektif mendukung hak-hak Rohingya, tidak semua anggotanya memiliki komitmen yang sama dalam mendorong langkah konkret. Beberapa negara anggota cenderung lebih fokus pada retorika politik daripada aksi nyata, sehingga Indonesia harus berupaya keras untuk mendorong konsensus yang efektif dalam mengambil tindakan bersama, seperti penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional (ICJ). Sementara itu, dalam konteks bilateral, tantangan terbesar datang dari sikap defensif dan resistensi pemerintah Myanmar terhadap tekanan internasional, terutama setelah kudeta militer pada 2021 (Dewinta, 2016, hlm 123-134).

Pemerintah Myanmar seringkali menganggap isu Rohingya sebagai urusan internal dan menolak campur tangan eksternal, termasuk dari negara-negara tetangga. Selain itu, prinsip *non-interference* ASEAN membatasi ruang gerak Indonesia untuk mendesak perubahan kebijakan di Myanmar. Hambatan lainnya adalah kompleksitas situasi di lapangan, seperti akses terbatas ke wilayah konflik di Rakhine State, yang menyulitkan Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung. Ditambah lagi, hubungan yang sensitif dengan Myanmar memaksa Indonesia untuk berhati-hati dalam bertindak agar tidak merusak hubungan diplomatik yang sudah terjalin (Setiawan & Suryanti, 2021, Vol 1, No 2). Meskipun menghadapi berbagai tantangan ini, Indonesia terus memainkan perannya melalui pendekatan diplomasi konstruktif, baik dengan memaksimalkan kerja sama multilateral di OKI maupun dengan menjaga dialog yang intensif dengan Myanmar. Strategi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam

mencari solusi damai bagi konflik Rohingya meski dalam kondisi yang penuh hambatan. Pada Juni 2012, pemerintah Myanmar mengumumkan darurat militer di wilayah Rakhine setelah pembantaian umat Buddha Rakhine kepada etnis Muslim Rohingya. Pemerintah Myanmar kemudian mengirim pasukan ke daerah-daerah yang mengalami kerusuhan. Namun tidak seperti yang diharapkan para pasukan tersebut justru malah memperparah situasi dimana mereka yang di harapkan dapat meredam atau mengurangi kerusuhan malah membuatnya semakin parah. Muslim Rohingya ditembak mati oleh tentara pemerintah Burma karena diyakini sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Pasukan tersebut diketahui terlibat terhadap tindakan-tindakan penangkapan massal yang berujung pada pembunuhan dan juga pemerkosaan kepada etnis rohingya selama kerusuhan antara dua etnis tersebut (Thontowi, 2013).

Diplomasi Indonesia Dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Indonesia berusaha melakukan diplomasi sebagai kebijakan untuk menangani konflik Rohingya, dimana diplomasi tersebut merupakan diplomasi multilateral terhadap Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Adapun OKI sendiri adalah organisasi pemerintah internasional (IGO) yang memiliki jumlah anggota sebanyak 57 negara. Indonesia sendiri masuk dan menjadi anggota dari OKI pada tahun 1969 lalu dan masih berlanjut sampai saat ini, negara Indonesia terus berpartisipasi secara aktif dalam menghadiri berbagai acara pertemuan yang OKI adakan untuk membahas program-program OKI kedepannya dan yang masih berlangsung (OIC). Dinamika politik dalam negeri Myanmar juga memengaruhi efektivitas penerapan strategi diplomasi Indonesia, terutama karena sikap pemerintah Myanmar yang sering menghindari tekanan eksternal atas isu Rohingya. Rezim militer yang berkuasa pasca-kudeta 2021 menunjukkan resistensi yang lebih besar terhadap kritik internasional dan menolak pembahasan masalah Rohingya sebagai isu internasional. Hal ini menciptakan dilema bagi Indonesia yang ingin menjaga hubungan diplomatik sekaligus memperjuangkan solusi damai.

Indonesia merespons dengan memanfaatkan pendekatan non-konfrontatif khas ASEAN dan mengedepankan quiet diplomacy untuk menjalin dialog langsung dengan pemerintah Myanmar. Namun, di sisi lain, dinamika ini membatasi ruang gerak Indonesia untuk bersikap tegas dalam mendesak pemerintah Myanmar melindungi etnis Rohingya. Oleh karena itu, Indonesia juga menggunakan diplomasi kemanusiaan sebagai strategi alternatif, dengan fokus pada pengiriman bantuan kepada pengungsi di perbatasan Bangladesh dan Rakhine State. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga stabilitas hubungan bilateral. Meski menghadapi kendala, strategi ini menunjukkan fleksibilitas Indonesia dalam menavigasi hubungan dengan negara yang bergejolak secara politik, sambil tetap menjalankan peran sebagai peacemaker dalam menyelesaikan konflik Rohingya. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di Asia. Oleh karena itu Indonesia berusaha untuk mendorong OKI agar segera menemukan solusi-solusi bagi wilayah-wilayah atau negara-negara yang sedang dalam konflik. Seperti yang terjadi di Israel-palestina dimana isu Islam yang telah menjadi momok yang menakutkan di daerah atau negara-negara non muslim harus segera diselesaikan. Dan pada akhirnya saat KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) diselenggarakan di Kazakhstan pada 10,09,09, Indonesia berusaha meminta OKI agar segera menciptakan solusi-solusi dalam menyelesaikan konflik Rohingya yang pada akhirnya Indonesia berhasil dimana OKI menawarkan solusi dalam bentuk kerjasama multilateral dengan Indonesia (Hasan, 2017).

Diplomasi Indonesia Dengan Negara Myanmar

Dalam melancarkan kebijakannya Indonesia juga mengalami beberapa kendala pastinya, dimana ternyata dari pihak pemerintahan Myanmar tidak ingin adanya pihak lain untuk mencampuri konflik tersebut, hal ini terlihat dari tindakan Myanmar yang mempersulit pihak-pihak luar untuk ikut campur tak kecuali Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Diplomasi Indonesia dalam konflik Rohingya telah memberikan dampak signifikan, meskipun perubahan besar dalam penyelesaian konflik ini masih terbatas. Melalui forum multilateral seperti OKI dan ASEAN, Indonesia berhasil meningkatkan kesadaran global tentang krisis Rohingya, mendorong negara-negara anggota untuk memberikan tekanan lebih pada Myanmar. Hal ini sangat erat kaitannya dengan teori diplomasi, yang mana diplomasi dalam hubungan internasional merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan politik dan mengelola hubungan internasional. Menurut James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, diplomasi adalah instrumen utama dalam kebijakan luar negeri yang digunakan negara untuk mempengaruhi pihak lain dan mencapai tujuan strategis tanpa kekerasan. Dalam konteks ini, politik luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip diplomasi yang mengarahkan kebijakan negara untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain serta mempromosikan perdamaian global. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara menengah, selalu berperan sebagai peacemaker, berusaha menyelesaikan konflik dengan cara damai (James & Robert, 2009).

Dalam kasus Rohingya, Indonesia menerapkan *constructive engagement*, sebuah pendekatan diplomatik yang mengutamakan dialog, keterlibatan aktif, dan kerjasama untuk mendorong perubahan positif tanpa menggunakan konfrontasi. Melalui diplomasi ini, Indonesia berupaya menyelesaikan konflik Rohingya dengan mendekati pihak-pihak yang terlibat, yaitu Myanmar dan komunitas internasional, sambil memberikan bantuan kemanusiaan dan mendorong Myanmar untuk menghormati hak-hak Rohingya, sesuai dengan prinsip perdamaian yang tercermin dalam diplomasi Indonesia. Dukungan Indonesia terhadap langkah hukum Gambia di Mahkamah Internasional (ICJ) juga memperkuat upaya internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia, meskipun Myanmar tetap mempertahankan sikap defensif. Dalam hal bantuan kemanusiaan, Indonesia berhasil mengirimkan bantuan yang sangat dibutuhkan, meskipun hambatan dalam proses repatriasi tetap ada, dengan Myanmar yang belum dapat memberikan jaminan keamanan dan hak-hak dasar bagi pengungsi yang kembali. Diplomasi Indonesia juga telah mendorong perubahan dalam posisi ASEAN yang lebih terbuka terhadap isu Rohingya, meskipun prinsip *non-interference* tetap membatasi kapasitas ASEAN untuk bertindak tegas. Di sisi lain, diplomasi bilateral Indonesia dengan Myanmar menghadapi hambatan besar setelah kudeta militer 2021, karena Myanmar semakin menutup diri terhadap tekanan internasional.

Secara keseluruhan, meskipun diplomasi Indonesia berhasil memperjuangkan hak-hak Rohingya di tingkat internasional dan memberikan bantuan kemanusiaan, perubahan signifikan dalam penyelesaian konflik ini masih terbatas, terutama karena keteguhan sikap pemerintah militer Myanmar dan kompleksitas politik domestik yang ada. Pada akhirnya Indonesialah yang berhasil mendapat kepercayaan dari pihak pemerintahan Myanmar untuk turut membantu dalam menyelesaikan konflik tersebut, Indonesia terpilih karena Myanmar merasa selama ini hanya Indonesia yang berusaha untuk membantu dengan cara perdamaian atau tan adanya unsur celaaan dan penganiaaan dalam menangani kasus tersebut dimana Indonesia menggunakan cara *conctructive enggegament* untuk penanganannya terhadap konflik Rohingya (Sanyoto, Harini & Dipokusumo, 2019).

Dalam mendukung peran Indonesia sebagai *peacemaker* dalam konflik Rohingya, data dan fakta konkret menunjukkan upaya signifikan yang telah dilakukan oleh Indonesia. Hingga 2024, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya berada di Bangladesh, terutama di kamp Cox's Bazar, yang merupakan salah satu kamp pengungsi terbesar di dunia. Selain itu, sekitar 600.000 Rohingya masih bertahan di Rakhine State, Myanmar, dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Indonesia telah mengambil beberapa inisiatif, seperti mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U pada 2017 untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat Rohingya dan etnis lainnya, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, dan perlengkapan dasar senilai lebih dari USD 1 juta pada 2023 melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre). Di tingkat multilateral, Indonesia juga mendukung langkah hukum yang diambil oleh Gambia terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional (ICJ), memperjuangkan hak-hak Rohingya secara internasional (Rosyid, 2019, Vol 49, No 3). Namun, situasi di Myanmar tetap sulit, dengan laporan dari Amnesty International pada 2023 yang menunjukkan bahwa tindakan militer terhadap Rohingya masih berlanjut. Proses repatriasi pengungsi Rohingya juga terkendala karena minimnya jaminan keamanan dan hak asasi bagi mereka yang kembali ke Myanmar. Meskipun menghadapi hambatan, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjalankan peran aktif sebagai mediator dan memberikan bantuan kemanusiaan, sambil berupaya memajukan solusi damai bagi konflik ini.

Dalam diplomasinya dengan Myanmar Indonesia menggunakan cara *constructive enggegament* yang mana salah satunya adalah upaya penawaran solusi yang berupa sebuah proposal tentang solusi penanganan terhadap konflik rohingya, proposal tersebut dikenal sebagai resolusi 4 plus 1, proposal tersebut memuat tentang pemulihan stabilitas kemanan dengan tanpa adanya unsur kekerasan, perlindungan atas semua Ras tanpa pandang bulu, kemudian mengenai dipermudahkannya bantuan dari luar tan adanya unsur-unsur yang mempersulit. Resolusi tersebut terangkum dalam dokumen "Laporan Ringkas Presiden Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Pertemuan Kepala Negara dan Pemerintahan mengenai Muslim Rohingya di Myanmar" (Tashandra, 2017).

KESIMPULAN

Dari penjabaran diplomasi multilateral Indonesia dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan diplomasi bilateral Indonesia dengan Myanmar yang menggunakan pendekatan *Constructive Engagement* pada kedua bentuk diplomasi tersebut secara tidak langsung dapat dipahami bahwa Indonesia mencoba untuk merealisasikan identitas perannya dalam dunia internasional sebagai pencipta perdamaian (*Peacemaker*). Dari penjabaran tersebut pula diharapkan bagi para pembaca akan munculnya kesadaran akan pentingnya mengkaji norma dan nilai dari setiap kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai

prestise yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Identitas pencipta perdamaian (*peacemaker*) yang di sematkan kepada Indonesia di ranah politik luar negeri Indonesia merupakan identitas yang terkonstruksi secara sosial akibat norma-norma kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dalam tujuan negara (*national interest*) prestise merupakan salah satu dari empat tujuan negara yaitu; keamanan (*security*), kedaulatan (*autonomy*), kesejahteraan (*welfare*), dan nama baik (*prestise*). Dengan prestise tersebut Indonesia akan dipandang dan diperhitungkan oleh negara-negara di dunia dari segi kebijakan dalam menghadapi isu-isu HAM dan konflik internasional. Strategi yang dilancarkan oleh Indonesia dalam usahanya untuk ikut andil menyelesaikan konflik Rohingya melalui strategi diplomasi *constructive engagement* yaitu dengan cara jalur damai seperti dialog dapat memperkuat identitas Indonesia di ranah politik internasional yang dikenal sebagai *prestise*. Dimana *prestise* sendiri menjadi tujuan semua negara dalam ranah politik dan hubungan internasional agar tetap dapat dipercaya dalam menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewinta, R.T.A., (2016). “PERAN ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI) DALAM MENANGANI KONFLIK ETNIS RAKHINE-ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2012-2013”, *Journal of International Relations*, Vol 2, No 2, hlm 127-134, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/11140/10809>
- Wuryandri, G., et al. (2008). “Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestic”, Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 2.
- Prasetya, A.W. & Gewati, M., (29/06/2020). “Dompot Dhuafa Ikut Terjun Langsung Selamatkan Pengungsi Rohingya di Aceh Utara”, (Berita Online, di akses pada 11 Desember 2024) <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/17212251/dompot-dhuafa-ikut-terjun-langsung-selamatkan-pengungsi-rohingya-di-aceh>
- Sanyoto D.R., Harini, S., & Dipokusumo, GPH., (2019). “Diplomasi Indonesia Terhadap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Rohingya”, *Solidaritas : Jurnal Ilmu Ilmu Sosial*, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/3039>
- Siswono, H. & Rahamat, A., (Kamis 29/12/2016 – 09:04 WIB), “Indonesia Kirimkan 10 Kontainer Bantuan Untuk Rohingya”, (Berita Online, di akses pada 11 Desember 2024), <https://www.viva.co.id/berita/nasional/864571-indonesia-kirimkan-10-kontainer-bantuan-untuk-rohingya>
- Rosyidin, M., (2020) “Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat”, Depok: Rajawali Pers, hlm. 87.
- Setiawan, I.P. & Suryanti, M.S.D., (2021). “Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017- 2019)”, *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol 1, No 2, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/article/view/3741>
- Ali, W.O.R.F., (2022). “Sejarah Konflik Muslim Rohingya”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera*, <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jpmis/article/view/6>
- Umam, F. & kandar, I., (2022). “Perlindungan Warga Sipil Etnis Rohingya Dari Diskriminasi Pemerintahan Myanmar”, *Khazanah Multidisiplin*, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/17133>
- Thontowi, J., (2013). “Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional”, *PANDECTA Research Law Journal*, <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/2359>
- (OIC, https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en), (di akses 11 Desember 2024).
- Rosyid, M., (2019). “PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI E TANGANI ETNIS MUSLIM TNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 49, No 3, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jhp/article/1196/&path_info=Moh_Rosyid.pdf
- Hasan, R.A., (Liputan6.Com – 11/09/2017, 07:48 WIB). “Turki Dorong Negara Muslim Kerja Sama Hentikan Krisis Rohingya”, (Berita Online, di akses 11 Desember 2024). <https://www.liputan6.com/global/read/3089428/turki-dorong-negara-muslim-kerja-sama-hentikan-krisis-rohingya>
- Tashandra, N., (Kompas.com - 17/10/2017, 16:12 WIB). “Atasi Konflik Rohingya, Menlu Jelaskan soal Formula 4 Plus 1”, (Berita Online, di akses pada : 11 Desember 2024), <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/17/16120111/atasi-konflik-rohingya-menlu-jelaskan-soal-formula-4-plus-1>
- James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*, 9th edition (Pearson, 2009), p. 156.